

RENJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2024



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (RENJA-PD) Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026.

Dalam pengambilan keputusan hal serius yang harus diperhatikan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantudan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.



Tanjung Selor, Februari 2023
KEPALA BAPENDA

Dr. TOMY, SE.,M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

RENJA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTARA	2
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rlandasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	
BAB V. PENUTUP	



DAFTAR TABEL

RENJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2024

Hal

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	16
Tabel 2.3	Review Terhadap Rencana Akhir RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Utara	22
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	32
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	36



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1896);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- n. Peraturan Daerah Prov Noinisi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);

- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 19);
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
 - q. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);
-

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2024 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Akhir Perangkat Daerah
- 2.2 Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Anggaran sebesar **Rp. 42.124.255.173,-** (*Empat puluh dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). **Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan tahun 2022 dapat tercapai** dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2024 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebesar **Rp. 70.773.799.283,-** (*Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Beberapa kegiatan rutin operasional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan yang terkadang waktu dan pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan dan bersifat insidental.
- b. Kegiatan untuk mengikuti diklat/bimtek/kursus/seminar/workshop tergantung pada undangan dari penyelenggara.
- c. Terdapat beberapa kegiatan yang belanja pegawai (honorarium) tidak sepenuhnya dibayarkan karena ada beberapa perubahan besaran honorarium pada Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara.
- d. Pelaksanaan Rakor Pendapatan Daerah semestinya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, namun dalam pelaksanaannya karena keterbatasan waktu sehingga hanya dilaksanakan rakor 1 kali.
- e. Penyusunan produk hukum daerah (PERDA) masih dalam proses revisi sehingga masih belum bisa disosialisasikan ke 5 UPTD Kab/Kota.
- f. Terdapat beberapa kegiatan yang karena keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, diantaranya kegiatan optimalisasi

pendapatan daerah. Waktu pelaksanaan yang sangat terbatas sehingga rapat-rapat koordinasi tidak dapat diselenggarakan, oleh karena itu optimalisasi pendapatan daerah lebih kepada upaya-upaya dilapangan terkait koordinasi kejar target pendapatan disektor PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP

- g. Penetapan Target Pendapatan yang sering mengalami perubahan menyesuaikan kebutuhan belanja sehingga terkadang target yang disusun masih harus direvisi
- h. Masih minimnya sarana penunjang pelayanan pada standar pelayanan nasional sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan pekerjaan rehabilitasi pada kantor pelayanan (UPTD) di 5 (lima) Kab/Kota.
- i. Menuju *Indonesia go green* peran Bapenda juga melakukan kegiatan Penambahan yang berkaitan dengan penghijauan dan pembenahan taman dikantor UPTD seluruh Kalimantan Utara
- j. Pengadaan Kendaraan Dinas tiap UPTD Bapenda untuk menunjang operasional pelayanan
- k. Peningkatan Sarana Prasarana juga dianggap Penting demi menunjang peningkatan pelayanan optimal pada Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Laptop, Komputer, UPS, Printer, Kulkas, Mesin Uang, Audio, LCD dan Proyektor) untuk Kantor Induk dan UPTD Se Kalimantan Utara.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan upaya peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah baik melalui diklat dan bimtek ataupun mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Utara selengkapnyadapat dilihat pada **tabel 2.1 terlampir**.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
BADAN PENDAPATAN DAERAH s.d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah									
5.2	Keuangan									
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100%					100%	100%	100%
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen					-	-	20%
5.02.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	0%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Bulan					12 Bulan	2 Bulan	12 Bulan
5.2.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	100%	12 Org/Bln	12 Org/Bln	100%	12 Org/Bln	3 Org/Bln	20,00%
5.2.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	81%	12 Org/Bln	3 Org/Bln	20,00%
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
5.02.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105 Orang	75%	8 Orang	-	0%	15 Orang	4 Orang	4%
5.02.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	39 Kegiatan	0	-	-		-	-	-
5.02.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	105 Orang	0	-	-		12 Orang		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	110 Unit	85,00%	10 Jenis	10 Jenis	100%	1 Paket	-	-
5.02.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	60 Unit	47,56%	53 Unit	53 Unit	100%	1 Paket	-	-
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	60 Bulan	91,52%	29 Jenis	29 Jenis	100%	12 Paket	0	20%
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan	60 Bulan	93,18%	8 Jenis	8 Jenis	100%	12 Paket	0	20%
5.02.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	10.000 Eksempler	47,03%	365 Eksempler	365 Eksempler	100%	2.0000 Dokumen	58 Dokumen	20%
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	99,76%	132 Paket	132 Paket	100%	12 Laporan	2 laporan	20%
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Disediakan	55 Unit					25 Unit		25 Unit
5.02.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	95,07%	-	-		0	-	60%
5.02.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	35 Unit		37 Unit	37 Unit	100%	1 Unit	-	10 Unit
5.02.01.1.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tidak Berwujud yang disediakan	15 Unit	95,77%	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	-	10 Unit
5.02.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	88,99%	-	-	-	3 Unit	-	
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa PenunjangnUrusan Pemerintah Daerah	60 Bulan					12 Bulan		12 Bulan
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	60 Bulan	99,57%	600 Pcs	600 Pcs	100%	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Bulan	99,67%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan
5.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa Pemeliharaannya	381 Unit					31 Unit	1 Unit	77 Unit
5.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau :apangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	26 Unit	87,50%	15 Unit	15 Unit	100%	26 Unit	-	26 Unit
5.02.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	225 Unit	78,10%	32 Unit	32 Unit	100%	0	-	45 Unit
5.02.01.1.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	99,55%	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	-	2 Unit
5.02.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan / Reabilitas	16 Unit	99,31%	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	4 Unit
5.02.02	Program Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		-				12 Bulan	12 Bulan	
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-		-						
5.02.02.2.02.05	Sub Kegiatan Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	-		-	Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%					100%	100%	100%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	60 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	60 Bulan	39,80%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan
5.02.04.2.01.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jmlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusoi Daerah	60 Bulan	34,05%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	2 Laporan	12 Bulan

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kalimantan Utara. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Prov Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Perumusan kebijakan dibidang Pendapatan Daerah sesuai Kalimantan Utara dengan kebijakan Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pendapatan daerah; dan
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur di 5 (lima) UPTD yang tersebar di Kabupaten/Kota

Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah menggunakan program aplikasi SAMSAT yang bertujuan untuk :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk jenis pembayaran pada kantor SAMSAT.

- b. Menggunakan sistem komputerisasi secara optimal dan maksimal sehingga dapat menghasilkan laporan yang tepat dan akurat.
- c. Mengembangkan suatu komputerisasi sistem yang mencakup semua kegiatan yang ada di SAMSAT untuk mempermudah dan memperlancar administrasi dan penyusunan laporan kendaraan dan keuangan.
- d. Menyiapkan suatu manajemen report sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk mempermudah para pimpinan didalamnya mengambil keputusan dan mengelola administrasi dan keuangan yang ada.
- e. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan alat bantu komputer didalam mengefisiensikan dan mengefektifkan tugas sehari-hari.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada **tabel 2.2 terlampir**.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisa
		2022 (tahun n-2)	2023 (tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	2022 (tahun n-2)	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi		100%	100%	100%		100%	100%	100%	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
4	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	
5	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Bulan	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Bulan	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	
6	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang/Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
7	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
8	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Orang	15 Orang	20 Orang	25 Orang	-	15 Orang	20 Orang	25 Orang	
9	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	-	-	640 Orang	640 Orang	-	-	640 Orang	640 Orang	
10	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	-	12 Orang	20 Orang	25 Orang	-	12 Orang	20 Orang	25 Orang	

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisa
		2022 (tahun n-2)	2023 (tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	2022 (tahun n-2)	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	
12	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	10 Jenis	1 Paket	25 Paket	25 Paket	10 Jenis	1 Paket	25 Paket	25 Paket	
13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	53 Unit	1 Paket	15 Paket		53 Unit	1 Paket	15 Paket		
14	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	29 Jenis	12 Paket	5 Paket	12 Paket	29 Jenis	12 Paket	5 Paket	12 Paket	
15	Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan	8 Jenis	12 Paket	3 Paket	12 Paket	8 Jenis	12 Paket	3 Paket	12 Paket	
16	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	365 Eksempler	2.000 Dokumen	1.480 Dokumen	2.000 Eksempler	365 Eksempler	2.000 Dokumen	1.480 Dokumen	2.000 Eksempler	
17	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132 Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	132 Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
18	Jumlah BMD yang Disediakan	38 Unit	25 Unit	15 Unit	5 Unit	38 Unit	25 Unit	15 Unit	5 Unit	
19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	5 Unit	-	-	-	5 Unit	-	-	
20	Jumlah Mebel yang disediakan	37 Unit	1 Unit	-	37 Unit	37 Unit	1 Unit	-	37 Unit	
21	Jumlah Aset Tidak Berwujud yang disediakan	1 Unit	-	2 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit	-	
22	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Penyediaan Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
24	Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	600 Pcs	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	600 Pcs	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
25	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
26	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
27	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa Pemeliharaannya	50 Unit	77 Unit	76 Unit	76 Unit	50 Unit	77 Unit	76 Unit	76 Unit	
28	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	15 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	15 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	
29	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	32 Unit	-	45 Unit	45 Unit	32 Unit	-	45 Unit	45 Unit	
30	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
31	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan / Reabilitas	1 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	1 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisa
		2022 (tahun n-2)	2023 (tahun n-1)	2024 (tahun n)	2025 (tahun n+1)	2022 (tahun n-2)	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
33	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
34	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
35	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
36	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
37	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak daerah	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
38	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator tunggal Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pendapatan perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas diseluruh pemerintahan provinsi Kalimantan Utara;

3. Memperkuat jaringan dan jangkauan operasional samsat pembantu, samsatkeliling dan Samsat jelajah bagi daerah yang masih kurang dari sisi jaringan komunikasi internet diperkuat dan jemput bola yang dianggap strategis bagi optimalisasi pendapatan;

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pajak belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
3. Masih terdapat wajib pajak yang belum tertib dilapangan.
4. Infrastruktur digital khusus penginputan sistem pajak provinsi belum terintegrasi.
5. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi PAD.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti

dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
- e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

2.4 Review terhadap Rencana Akhir RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, maka **Visi Provinsi Kalimantan Utara**, adalah:

"Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera"

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara .

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran

pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2022 dan tahun 2026.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 2.3 terlampir.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	41.022.840.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	41.022.840.000	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	150.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	150.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000	
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	35.070.840.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	35.070.840.000	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang Bulan	34.347.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang Bulan	34.347.000.000	
6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	723.840.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. & Kota Prov. Kaltara	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	723.840.000	
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	740.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	740.000.000	
8	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	250.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	250.000.000	
9	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	640 Orang	400.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	640 Orang	400.000.000	
10	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	20 Orang	90.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	20 Orang	90.000.000	
11	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.500.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.500.000.000	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	5.000.000	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Paket	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	15 Paket	150.000.000	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Paket	450.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	450.000.000	
15	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3 Paket	570.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	570.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
16	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	1.480 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	1.480 Dokumen	25.000.000	
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.300.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.300.000.000	
18	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan	2 Unit	50.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan	2 Unit	50.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket Mebel yang Disediakan			
21	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	2 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tidak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
22	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya			-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1.367.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		1.367.000.000	
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Laporan	17.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.000.000	
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	800.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	800.000.000	
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	550.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	550.000.000	
27	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	76 Unit	1.145.000.000	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	76 Unit	1.145.000.000	
28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jasa yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	26 Unit	550.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	550.000.000	
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	45 Unit	45.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	45 Unit	45.000.000	
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset tidak Berwujud		Jumlah Aset Tidak berwujud yang dilakukan Pemeliharaan	2 Unit	400.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset tidak Berwujud		Jumlah Aset Tidak Berwujud yang dipelihara	2 Unit	400.000.000	
31	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas	4 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang depelihara / direhabilitas	4 Unit	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
32	Program Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	-	800.000.000	Program Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	-	800.000.000	
33	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	800.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	800.000.000	
3	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	800.000.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	800.000.000	
4	Program Pengelola Pendapatan Daerah		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.217.085.000	Program Pengelola Pendapatan Daerah		Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.217.085.000	
35	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	3.217.085.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	3.217.085.000	
36	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.300.000.000	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.300.000.000	
37	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	12 Laporan	917.085.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 Laporan	917.085.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan sehingga Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan daerah yaitu membantu Gubernur dalam Menggali pendapatan Daerah yang ada di Wilayah Kalimantan Utara dan mencapai target pendapatan daerah serta koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayarpajak guna untuk selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Pada Badan Pendapatan Daerah tidak terdapat adanya usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;

- 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
- 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almitsus POLRI
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
5. Transformasi Ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan

antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional dan kredibel.
- b. Memantapkan sistem pengelolaan Pendapatan daerah yang terintegrasi.
- c. Memantapkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendapatan daerah.

2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Terlaksananya Optimalisasi Pendapatan daerah yang semakin tahun meningkat dan selalu maksimal dalam potensi Pendapatan Daerah yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
- c. Terlaksananya Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Renstra daerah pada tahun rencana.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN RENCANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	115,47 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B %	A %

4.1 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara merencanakan akan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan kegiatan sebanyak 8 (delapan) yang didukung oleh 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ii. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - iii. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - v. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - vi. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - ii. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - iii. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan
 - ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
 - iv. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - i. Sub Kegiatan Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - ii. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan visi kepala daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan Pendapatan daerah sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mewujudkan misi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan penerimaan daerah (optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah) baik melalui peningkatan pajak daerah maupun retribusi daerah dan dana perimbangan dari 3 (tiga) sektor yaitu pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Hal tersebut juga disertai dengan penyiapan dan perbaikan regulasi yang telah ada ataupun yang akan dikeluarkan/diterbitkan.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 terlampir.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN RENCANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode	Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan						
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kemendagri 050-5889 tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	S
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kemendagri 050-5889 Thn 2021				Tolak Ukur	Target				
							Target	Sat	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4	13	14	4	16							
5.2	Keuangan										43.286.190.000			61.936.923.500								
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi					100 %				38.788.840.000		100 %	43.788.130.000								
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun					2 Dokumen			150.000.000		2 Dokumen	150.000.000								
5.02.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten & Kota Prov. Kaltara			2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	APBD	2 Dokumen	150.000.000								
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12 Bulan			32.823.840.000		12 Bulan	37.475.130.000								
5.2.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten & Kota Prov. Kaltara			12 Bulan	120 O/B	32.100.000.000		120 O / B	36.751.290.000								
5.2.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten & Kota Prov. Kaltara			12 Bulan	12 Dokumen	723.840.000		12 Dokumen	723.840.000								
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12 Bulan			630.000.000		12 Bulan	840.000.000								
5.02.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten & Kota Prov. Kaltara			20 Orang	15 Orang	200.000.000	APBD	25 Orang	300.000.000								
5.02.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan			Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kabupaten & Kota Prov. Kaltara			8 Kegiatan	640 Orang	350.000.000	APBD	640 Orang	420.000.000								
5.02.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan			Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Kabupaten & Kota Prov. Kaltara			20 Orang	20 Orang	80.000.000	APBD	25 Orang	120.000.000								

Kode	Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				Keterangan				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kemendagri 050-5889 tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kemendagri 050-5889 Tln 2021				Tolak Ukur	Target				
							Target	Sat	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4	13	14	4	16							
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 Bulan			2.379.000.000			2.560.000.000								
5.02.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			Jumlah Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor Yang Disediakan				20 Unit	25 Paket	4.000.000	APBD	25 Paket	5.000.000								
5.02.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan				15 Unit	15 Paket	150.000.000	APBD		-								
5.02.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik			Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Bulan	5 Paket	400.000.000	APBD	12 Paket	450.000.000								
5.02.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				12 Bulan	3 Paket	500.000.000	APBD	12 Paket	580.000.000								
5.02.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan				2.000 Eksemplar	1.480 Dokumen	25.000.000	APBD	2.000 Dokumen	25.000.000								
5.02.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Laporan	1.300.000.000	APBD	12 Laporan	1.500.000.000								
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan					15 Unit		2 Unit	200.000.000			150.000.000								
5.02.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan							APBD	-	-								
5.02.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			Jumlah Mebel yang disediakan	Jumlah paket Mebel yang Disediakan							APBD	37 Unit	150.000.000								
5.02.01.1.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tidak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Jumlah Unit Aset Tidak Berwujud yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	200.000.000	APBD		-								
5.02.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya													-								

Kode	Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan				
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kemendagri 050-5889 tahun 2021)		Target capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kemendagri 050-5889 Tln 2021				Tolak Ukur	Target			
							Target	Sat	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4	13	14	4	16						
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan					12 Bulan				1.366.000.000			1.368.000.000						
5.02.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Laporan	16.000.000	APBD	12 Laporan	18.000.000							
5.02.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Bulan	12 Laporan	800.000.000	APBD	12 Laporan	800.000.000							
5.02.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Laporan	550.000.000	APBD	12 Laporan	550.000.000							
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya					76 Unit		76 Unit	1.240.000.000		76 Unit	1.245.000.000							
5.02.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jasa yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				26 Unit	26 Unit	550.000.000	APBD	26 Unit	550.000.000							
5.02.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				45 Unit	45 Unit	40.000.000	APBD	45 Unit	45.000.000							
5.02.01.1.09.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset tidak Berwujud			Jumlah Aset Tidak berwujud yang dilakukan Pemeliharaan	Jumlah Aset Tidak Berwujud yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	400.000.000	APBD	2 Unit	400.000.000							
5.02.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas	Jumah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitas				3 Unit	3 Unit	250.000.000	APBD	3 Unit	250.000.000							
5.02.02	Program Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah					100 %				800.000.000			800.000.000							
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah					12 Dokumen			800.000.000			800.000.000							

Kode	Usuran/Bidang Usuran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan						
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra Perangkat Daerah)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kemendagri 050-5889 tahun 2021)	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian Kinerja								Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	SPM
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan Kemendagri 050-5889 Tthn 2021				Tolak Ukur	Target				
							Target	Sat	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4	13	14	4	16							
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tansfer Lainnya				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tansfer Lainnya					12 Dokumen	800.000.000	APBD	12 Dokumen	800.000.000		10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah						
5.02.04	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah					100 %				3.697.350.000			17.348.793.500								
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12 Bulan			3.697.350.000			17.348.793.500								
5.02.04.1.01.02	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Bulan	12 Dokumen	2.500.000.000	APBD	12 Dokumen	2.900.000.000		10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah						
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pajak daerah dan Retribusi Daerah				12 Bulan	12 Laporan	1.197.350.000	APBD	12 Laporan	14.448.793.500		10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah						

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjung Selor, Februari 2023
KEPALA BAPENDA

Dr. TOMY, SE.,M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009



